



Selisih Dana PER Rp 384 Juta

PDI Perjuangan: Itu Piutang Daerah

MEMPAWAH. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah mengungkapkan adanya selisih penerimaan pembayaran atas tunggakan klaim dana Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp 384 juta. PDI Perjuangan juga sependapat dengan sikap BPK RI yang menyebut program tersebut bukan lagi bergulir, melainkan piutang daerah.

"Pada prinsipnya kami sependapat dengan BPK RI yang menyatakan program LAPIM, PER, DPMU dan Penggaduhan serta Penggemukan Sapi bukan lagi program bergulir, tetapi piutang daerah," tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Amon Amed

STh dalam Sidang Paripurna DPRD Mempawah, Selasa (2/9) sore.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan itu bukannya tanpa alasan. Misalnya, pada Program PER dalam neraca dilaporkan sisa klaim sebesar Rp 814.246.130 atas klaim tunggakan sebesar Rp 1.275.480.119, dengan pengembalian sebesar Rp 461.233.989 per tanggal 31 Desember 2013. "Namun, dari penelusuran yang kami lakukan pada Bank Kalbar, sisa klaim dana PER justru sebesar Rp 430.224.326, atau terdapat selisih Rp 384.021.804 dari laporan yang disampaikan," ungkapinya.

Bahkan, sambung Amon,

berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan pihaknya ke PT Bank Kalbar, selama ini penyetoran pinjaman dana PER tidak lagi melalui rekening bank, melainkan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah (RKUPD). Sebab, bank tidak lagi menyediakan rekening khusus untuk menampung pengembalian dana PER tersebut. "Kami juga mendapatkan pengakuan dari pihak bank terkait dana giro pemerintah daerah sebesar Rp 945 juta sudah didebet sebagai jaminan atas kredit macet. Dengan kondisi ini, harusnya penerimaan pembayaran atas tunggakan klaim dana PER menjadi penerimaan daerah,"

pendapatnya.

Lebih jauh, Amon men-erangkan, hasil konfirmasi yang didapat pihaknya ke PT Bank Kalbar tersebut sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan PT Bank Kalbar Nomor 900/1450/TU-UM dan Nomor Dir/PKS-PEM/05/2001 pada pasal 4 ayat 9. "Namun dari analisa kami berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, laporan keuangan pada tahun 2012 dan 2013 terkait pengembalian dana program tersebut belum masuk sebagai penerimaan daerah, bahkan bisa dibbilang tidak jelas pencatatannya," sesal Amon.

Ke depan, Amon mengin-gatkan pemerintah daerah, hendaknya lebih valid dan profesional dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai pedoman dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan administrasi keuangan. "Kita menyarankan agar kinerja pengelola keuangan daerah harus lebih ditingkatkan lagi. Lebih teliti dan profesional berlandaskan pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebab, masalah laporan keuangan daerah ini sangat penting. Terlebih dalam mencapai tujuan kita bersama mendapatkan pre-dikat tertinggi dari BPK RI," tukasnya. (ha)